

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah menganjurkan perusahaan untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dengan cara menggambarkan kesan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunannya.²³

B. Pengertian ISR (*Islamic Social Reporting*)

ISR pertama kali digagas oleh Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani dan Erlane K. Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa, terdapat banyak keterbatasan dalam dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang dapat diukur dengan menggunakan sebuah indeks yakni indeks ISR.²⁴

²³ Tania Yudhantika dan Maswar Patuh Priyadi, “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*” , Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Surabaya, 2019, Vol. 8, No. 5, hlm.3

²⁴ Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto, “ *Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah*”, Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm.2

Islamic Social Reporting atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan dengan dasar masing-masing peneliti berikutnya. Namun, secara konseptual terdapat beberapa pengertian mengenai *Islamic Social Reporting* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁵

- b. Menurut Haniffa ISR merupakan perpanjangan pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurusan atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim.²⁶

²⁵ Op.Cit. hlm.216.

²⁶ Op.Cit. hlm.5

- c. Menurut Bayu Tri Cahya ISR merupakan pelaporan sosial yang tidak hanya melibatkan harapan secara holistik dari masyarakat mengenai peran perusahaannya tetapi juga pada perspektif spiritual.²⁷

Dari berbagai macam definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa ISR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi oleh sebagai bentuk komitmen pengusaha untuk menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan nilai-nilai islam dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik pihak *internal* (dalam) perusahaan maupun masyarakat agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan mementingkan kepedulian terhadap lingkungan.

C. Indikator-Indikator ISR (*Islamic Social Reporting*)

Indeks *Islamic Social Reporting* digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial bisnis syariah. *Islamic Social Reporting* tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Indikator ISR ini menggunakan 6 tema pengungkapan yang dibangun oleh Othman²⁸:

²⁷ Ibid

²⁸ Meutia Handayani,dkk, “Analisis Penilaian Skor Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta *Islamic Index (JII)*, (Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) Vol.4.No.2.2020.hlm.149

a. Pendanaan dan Investasi

Tema pendanaan dan investasi ini memuat tentang pengungkapan hal-hal yang berkenaan dengan riba (mengenai beban dan pendapatan bunga), *gharar* (penjualan dan pembelian suatu komoditi termasuk valuta asing yang harganya tidak pasti), zakat, kebijakan keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih, *value added statement* (laporan pertambahan nilai) dan neraca saldo atas nilai kini.

b. Produk dan Jasa

Setiap perusahaan diharapkan menghasilkan produk yang aman, berkualitas, ramah lingkungan dan bersertifikat halal. Dalam tema ini memuat informasi tentang produk yang ramah lingkungan sebagai partisipasi terhadap pelestarian lingkungan, produk yang halal, produk yang aman dan berkualitas dan pelayanan keluhan konsumen.

c. Karyawan

Tema mengenai apakah perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan dan cuti, tunjangan, remunerasi, Pendidikan dan pelatihan kerja, kesetaraan *gender*, keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen, Kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, karyawan dari kelompok khusus (cacat fisik, mantan

narapidana, mantan pecandu narkoba), karyawan kelas atas melakukan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan bawah, karyawan muslim diperbolehkan menjalankan ibadah diwaktu-waktu shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan.

d. Masyarakat

Tema ini mencerminkan betapa pentingnya saling berbagi dan meringgankan beban orang lain. Pelaksanaan tema ini dilakukan perusahaan dengan memberikan donasi, bantuan dan kontribusi terhadap masyarakat yang semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

e. Lingkungan

Apabila dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban menyampaikan mengenai konservasi lingkungan, kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dan lain-lain), Pendidikan melalui lingkungan, pernyataan vertifikasi independent atau audit lingkungan, sistem manajemen lingkungan maka perusahaan tersebut telah menyampaikan ISR.

f. Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan dinilai telah mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) jika mengungkapkan status kepatuhan terhadap syariah, struktur kepemilikan saham, profil dewan direksi, pengungkapan melakukan praktik monopoli

usaha atau tidak, pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak, pengungkapan melakukan perkara hukum atau tidak, dan kebijakan anti korupsi.

D. Konsep dan Pemahaman Akuntabilitas Sosial

1. Konsep Akuntabilitas

Manusia diciptakan dan turun ke bumi dengan misi utamanya yaitu untuk memakmurkan bumi dan alam sekitarnya. Manusia mendapatkan mandat/amanah tersebut dengan disertai kebebasan untuk melakukan apa saja sesuai dengan daya fikir dan kemampuan inderanya. Ditengah kebebasan tersebut, manusia diberi tuntunan mengenai hal-hal yang baik dan buruk dalam menjalankan hidup dan kehidupan dimuka bumi ini. Manusia telah dibekali dengan naluri tentang yang baik dan yang buruk, yaitu Nurani yang bersifat menerangi jalan hidup manusia menuju kebaikan. Dalam diberikan kebebasan untuk merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan amanah tersebut. Namun, karena kehidupan berada dalam suatu keseimbangan dan selalu akan bergerak kearah keseimbangan dan selalu akan bergerak kearah keseimbangannya, maka adanya kebebasan hak akan selalu diikuti dengan adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan implementasi amanah. Konsep ini dikenal sebagai konsepsi akuntabilitas.

Konsep akuntabilitas secara filosofis timbul karena adanya mandate/amanah. Pemberian mandate/amanah itu sendiri didasari atas adanya rasa percaya (*Trust*) dari pihak yang memberi kepercayaan (*Trustee*). Agar terciptanya suatu kondisi yang adil diantara kedua belah pihak tersebut, diperlukan adanya hukum (*Law*) yang akan mengatur mekanisme sehingga terwujud suatu ketertiban antara kedua belah pihak tersebut²⁹. Konsep akuntabilitas juga mengacu kepada kemampuan untuk menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dalam arti bahwa mereka dipaksa harus memberitahukan dan menjelaskan Tindakan maupun keputusan-keputusannya.³⁰

Untuk mampu berakuntabilitas dalam menjalankan dan mengimplementasi mandate/amanah yang diterimanya tersebut manusia tidak melepaskan begitu saja. Manusia mendapatkan anugerah kemampuan yang menyertai kehidupannya. Kemampuan yang diterima manusia meliputi antara lain : (1) kemampuan untuk menikmati dan melakukan berbagai aktivitas fisik yang direpresentasikan oleh kemampuan inderawi (*hand*). Manusia memang telah diciptakan oleh yang maha kuasa agar dapat hidup nyaman, senang, tanpa rasa was-was dan tanpa selalu ragu. Namun indera memiliki kelemahan yang

²⁹ Ismail Mohamad, Sjahruddin Rasul, dan Haryono Umar, “ *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*”, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, Juni 2004),hlm.12

³⁰ Urbanus Ola, dan Frans B. Tokan, “ *Pelebagaan Akuntabilitas Sosial dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*”, (NTT : Prosiding Seminar Nasional PRODI Ilmu Pemerintahan,2018), hlm.287

sangat *inheren* yakni sifat memanipulasi yang sangat jelas sehingga membawa manusia selalu tertipu oleh dirinya sendiri, (2) kemampuan yang merupakan ciri khas manusia yang tidak diberikan tuhan kepada (*head*) yang dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran –pemikiran kearah perbaikan kualitas hidup manusia dan alam sekitarnya; dan (3) kekuatan rasa (*qolbu=heart*). Yang ketiga ini menuntut manusia kearah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak direkayasa oleh arogansi rasio manusia.

Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi yaitu karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Dari pengertian diatas tersirat bahwa pihak yang diberikan mandate/amanah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan kata lain laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekedar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk juga kinerja dari pelaksanaan

suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan.

2. Pengertian Akuntabilitas Sosial

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Akuntabilitas yaitu kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban³¹. Terdapat beberapa pengertian mengenai Akuntabilitas sosial adalah sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas sosial diartikan menjadi sebuah pendekatan yang menempatkan kontrak sosial sebagai sebuah instrument dasar dalam mengembangkan prinsip akuntabilitas dari praktek pemerintahan.
- b. Akuntabilitas sosial ialah sebuah kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan prinsip akuntabilitas dari praktek pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas sosial sangat diperlukan dan signifikan.

³¹ I Made Agus Suteja dan Igan Budiasih, “ Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sebagai Bagian Laporan Pertanggungjawaban pada Akuntabilitas Publik dan Transparansi ”, (Bali : E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Udayana 5.1, 2016

- c. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban para pemegang kekuasaan (pejabat publik) untuk mempertanggung jawabkan segala aktifitasnya yang mengatas namakan publik. Pejabat publik tersebut adalah mereka yang atas nama publik diberi kewenangan politik, keuangan, atau bentuk lain dari kekuasaan. Jadi akuntabilitas sosial yakni merupakan bentuk akuntabilitas yang bertumpu pada pelibatan masyarakat³².
- d. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas yaitu sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala.
- e. Menurut Wikipedia, akuntabilitas yaitu konsep etika ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Dari berbagai macam definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sosial adalah sebuah kontrak sosial penguasa dalam sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

³² Sukarno L Hasyim, “ *Problematika Guru PAI Realita dan Idealita Sebagai Akuntabilitas Sosial*”, (Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi), hlm.88

3. Indikator-Indikator Akuntabilitas Sosial

Pada hakikatnya indikator merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menjelaskan dan memahamkan mengenai suatu hasil suatu aktivitas kegiatan. Sebagaimana teori Koppel yang menyatakan bahwa terdapat lima indikator akuntabilitas sosial yaitu :

a. *Transparency*

Transparansi sebagai penyediaan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi yang terjadi pada PT. Bukit Asam (Persero) Unit Kertapati Palembang adalah pengungkapan fakta-fakta kinerja secara menyeluruh kepada publik atau warga negara.

b. *Liability*

Liabilitas ialah hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki.

c. *Controllability*

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian yang terjadi pada PTBA yakni pengendalian keseluruhan kebijakan untuk memenuhi kepentingan politik pemegang kekuasaan.

d. *Responsibility*

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Tanggung jawab sosial PTBA Unit Kertapati yaitu membantu korban kebakaran di Lorong santai kertapati, memberi bantuan kepada anak panti asuhan maupun membagikan beasiswa kepada siswa SMA.

e. *Responsiveness*

Ketanggapan adalah suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsive*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Ketanggapan PTBA Unit Kertapati pemenuhan harapan, keinginan dan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan. Pemenuhan ini didasarkan pada tugas

Kementerian BUMN sebagai instansi pemerintah yaitu melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan yang diharapkan dari Kementerian BUMN adalah dalam kaitan dengan pembinaan BUMN tersebut.³³

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, berikut penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka :

Muhammad Taufiq Abadi, Muhammad Sultan Mubarok dan Ria Anisatus Sholihah (2020) dengan judul “ Implementasi *Islamic Social Reporting Index* Sebagai Akuntabilitas Sosial Bank Syariah”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa data empiris tingkat pengungkapan ISR pada BUS di Indonesia periode 2012-2017. pertama tema pendanaan dan investasi terdapat 6 BUS yang kurang informatif, kedua pada tema produk dan jasa yang kurang informatif adalah BRI Sy, Ketiga pada tema karyawan terdapat 5 BUS yang kurang informatif, keempat pada tema masyarakat terdapat 6 BUS yang kurang informatif, kelima pada tema lingkungan terdapat 9 BUS yang kurang informatif. Walaupun sebenarnya skor indeks ISR yang rendah (kurang informatif). Walaupun sebenarnya skor indeks ISR yang rendah (kurang informatif) tidak dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan

³³ Yanhar Jamaluddin, “ Analisis Terhadap Indikator Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara-2015”, Jurnal TAPIs, Vol. 14, No. 01, Januari-Juni 2017, hlm. 85

baik karena terdapat dua kemungkinan, yaitu perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosial secara syariah akan tetapi tidak diungkapkan dalam laporan-laporannya atau perusahaan tersebut memang tidak melakukan tanggung jawab sosial secara syariah.³⁴

Bayu Tri Cahya, (2018) dengan judul “ Diskursus *Islamic Social Reporting* Sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pengungkapan yang memperhatikan indeks ISR belum mencapai hasil yang benar-benar maksimal, namun sudah cukup akuntabel. Meskipun terdapat aturan mengenai kewajiban sosial pada perusahaan perusahaan Indonesia, namun belum cukup kuat dalam penegakan dan pengawasan oleh pihak regulator. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang jelas dan tegas mengenai aturan-aturan pelaporan sosial berbasis islami oleh entitas berbasis syariah.³⁵

Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015) dengan judul “ *Islamic Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable *Investment Account Holders* dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

³⁴ Muhammad Taufiq Abadi, et.al. “ *Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Akuntabilitas Sosial Bank Syariah*”. Jurnal Al-Insiyroh : Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1, 1 Maret 2020.

³⁵ Bayu Tri Cahya, “ *Diskursus Islamic Social Reporting Sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah*”. Madani Vol. 22, No.1, Juni 2018.

dewan pengawasan syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.³⁶

Citra Indah Merina. et.al (2015), dengan judul “ Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta *Islamic Index*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak benar-benar beroperasi dengan konsep syariah, ternyata memang belum cukup baik untuk memenuhi indeks ISR dibandingkan perusahaan perbankan syariah yang secara umum diketahui melalui banyak penelitian bahwa telah mengungkapkan indeks ISR dengan cukup baik.³⁷

Ali Rama (2014), dengan judul “ Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bagian atau tema pengungkapan yang nilainya cukup tinggi adalah tema tata Kelola organisasi (perusahaan). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah cukup baik dalam melakukan pengungkapan tata Kelola perusahaan. Sedangkan tema pengungkapan yang masih memiliki nilai cukup rendah dibandingkan dengan tema lainnya adalah tema lingkungan. Nilai yang masih minim ini menunjukkan bahwa bank syariah yang dijadikan sampel dalam

³⁶ Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto.“ *Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah*”. Accounting Analysis Journal. ISSN 2252-6765. 2015

³⁷ Citra Indah Merina, et.al. “ *Pengungkapan Indeks Islamic Reporting Perusahaan GO Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index*”. Universitas Binadarma.

penelitian ini masih kurang baik dalam melakukan pengungkapan ISR khususnya dalam tema lingkungan.³⁸

Tania Yudhantika dan Maswar Patuh Priyadi (2019), dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). dan perusahaan syariah yang lebih besar akan cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas dibandingkan dengan perusahaan syariah yang lebih kecil.³⁹

Riri Asriati dan Permata Ulfah (2016), dengan judul “ Analisis Perbandingan Komponen *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Syariah Antara Negara Indonesia dan Malaysia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia lebih rendah dibandingkan perbankan syariah di Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor tingkat pengungkapan yang diperoleh bank syariah di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia selama tahun 2012-2014. Kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami

³⁸ Ali Rama. “ *Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)*”. Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah di Indonesia, Vol.2, No. 1, 2014. hlm.112

³⁹ Tania Yudhantika dan Maswar Patuh Priyadi. “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*”. Surabaya : Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, e-ISSN:2460-0585. hlm. 18

kenaikan $\pm 8,5\%$, begitu pun dengan kinerja sosial bank Islam di Malaysia mengalami kenaikan selama tahun 2012-2014, yakni $\pm 9\%$.⁴⁰

Ardiani Ika Sulistyawati dan Indah Yuliani (2017), dengan judul “*Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Indeks Saham Syariah Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap ISR secara parsial, Size (Ukuran Perusahaan), Profitabilitas dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR secara parsial.⁴¹

Hasanah et,al (2017), dengan judul “*Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran komite audit, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Sedangkan variabel ukuran dewan komisaris, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).⁴²

⁴⁰ Riri Asriati, dan Permata Ulfa. “*Analisis Perbandingan Komponen Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Antara Negara Indonesia dan Malaysia*”. Lampung : Simposium Nasional Akuntansi XIX. 2016. hlm. 17

⁴¹ Ardiani Ika Sulistyawati dan Indah Yuliani. “*Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Indeks Saham Syariah Indonesia*”. Semarang : Journal Of Accounting & Finance, Vol. 13, No. 2. 2017. hlm. 25

⁴² Hasanah et al. “*Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*”. Universitas Jember (Unej) : Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. 2:115-120

Naila Faricha (2014), dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011-2014)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ISR. Profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ISR.⁴³

Siti Amerieska et,al (2012), dengan Judul “ Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau dari Perspektif *Shari'ate Enterprise Theory*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini dilakukan pada konteks organisasi bisnis dan sosial keagamaan yang masuk dalam kategori mikro finance, yakni BMT (Baitul Maal Wat Tamwil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam BMT ternyata masih ter_dapat superiortas akuntabilitas yang berpusat pada manusia, hal ini dilihat dari tingkatan akuntabilitas yang mana tingkatan pertama ditujukan pada dewan pengawas. Tingkatan kedua, akuntabilitas manajemen diarahkan pada Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan pada tingkatan tiga, akuntabilitas manajemen berupa pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kemudian program-program yang dijalankan pada aktivitas BMT masih mengedepankan program yang bersifat kebutuhan ekonomi dan sosial (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial). Sedangkan akuntabilitas kepada alam masih dijalankan

⁴³ Naila Faricha. “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011-2014”. Surabaya.

secara tidak langsung dengan adanya program penyuluhan usaha tani yang memberikan kesadaran untuk usaha pelestarian alam dengan penghijauan.⁴⁴

Sri Hastjarjo (2015), dengan judul “ *Citizen Journalism* Sebagai Media Partisipasi Pembangunan Akuntabilitas Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa . Berdasar temuan di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa komponen kunci untuk membangun literasi informasi publik, yaitu penyediaan informasi publik oleh pemerintah daerah dan kapasitas warga untuk mengakses, mengkritisi, dan memanfaatkan informasi terkait pelayanan publik di daerah.⁴⁵

Syafira Aryanti (2020), dengan judul “ Akuntabilitas Manajemen Pendidikan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala sekolah memiliki peranan yang penting atas strategi yang diterapkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah melalui penyusunan program-program unggulan sekolah yang menjadi implementasi mutu pendidikan yang ada di sekolah. Tentu strategi setiap kepala sekolah dengan kepala sekolah lain dalam upaya peningkatan mutu di sekolah berbeda-beda baik karena faktor pengalaman dan juga kecakapan wawasan tentang manajemen sekolah. Bisa jadi apa yang diterapkan di SMA Kalam Kudus Surakarta akan berbeda dengan sekolah lain sehingga kajian tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

⁴⁴ Siti Amerieska et al. “ *Akuntabilitas Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari’ate Enterprise Theory*”. Malang : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol. 2, No. 1, 2012. hlm. 35

⁴⁵ Sri Hastjarjo, “ *Citizen Journalism Sebagai Media Partisipasi Pembangunan Akuntabilitas Pemerintah*”. Surakarta : Jurnal Masyarakat Telamatika dan Informas. Vol. 6, No. 2. 2015. hlm. 143

pendidikan di sekolah melalui program-program unggulan sekolah perlu dikaji mendalam karena keunikan masing-masing sekolah yang tentu antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda.⁴⁶

Catur Wulandari et,al (2014), dengan judul “ Akuntabilitas Sosial pada Pemerintahan Lokal (Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kecamatan Tawangmangu)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial masyarakat kelurahan kalisoro terbentuk karena adanya titik masuk berupa kurangnya kemampuan pemimpin, masalah yang muncul tersebut diolah dan disampaikan pada pemimpin dengan dukungan dari masyarakat melalui media demonstrasi, negoisasi, dan forum evaluasi kinerja dimana akuntabilitas sosial tersebut tidak membangun mekanisme dan pemantauan sosial tertentu.⁴⁷

Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitan	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhamad Taufik Abadi et al (2020)	Implementasi <i>Islamic Social Reporting Index</i> Sebagai Akuntabilitas	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian

⁴⁶ Syarifah Ariyanti. 2020. “ Akuntabilitas Manajemen Pendidikan”. Malang : Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan.

⁴⁷ Catur Wulandari et,al. “ *Akuntabilitas Sosial pada Pemerintahan Lokal*”. Tawangmangu : digilib.uns.ac.id.

		Sosial Bank Syariah	<p>kepastakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.</p>
2,	Bayu Tri Cahya (2018)	<p>Diskursus <i>Islamic Social Reporting</i> Sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah</p>	<p>Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepastakaan dengan analisis isi (content</p>

			<p>analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.</p>
3.	<p>Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015)</p>	<p><i>Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah</i></p>	<p>Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis</p>

			<p>penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.</p>
4.	Citra Indah Merina dan Verawty (2015)	<p>Pengungkapan Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> Perusahaan Go Publik Yang Listing di <i>Jakarta Islamic Index</i></p>	<p>Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni</p>

			penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.
5.	Ali Rama (2014)	Analisis Determinan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang

			terjadi saat sekarang.
6.	Tania Yudhantika (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Socil Reporting</i> (ISR)	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.
7.	Riri Asrianti dan Permata Ulfah	Analisis Perbandingan Komponen <i>Islamic</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif,

	(2014)	<i>Social Reporting</i> (ISR) pada Bank Syariah Antara Negara Indonesia dan Malaysia	jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.
8.	Ardiani Ika Sulistyawati (2017)	Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Indeks Saham Syariah Indonesia	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat

			<p>analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.</p>
9.	Hasanah et al (2017)	<p>Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).</p>	<p>Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan</p>

			metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.
10.	Naila Faricha (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Islamic Social Reporting</i> pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011-2014.	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha

			mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.
11.	Siti Amerieska (2017)	Akuntabilitas pada Baitul Maal Wal Tamwil Ditinjau dari Perspektif <i>Shari'ate Enterprise Theory</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.

12.	Sri Hastjarjo (2015)	<i>Citizen Journalism</i> Sebagai Media Partisipasi Pembangunan Akuntabilitas Pemerintah	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.
13.	Meila Hayudiyani et al (2020)	Akuntabilitas Manajemen Pendidikan	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dengan

			<p>analisis isi (content analysis) sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.</p>
14.	Catur Wulandari et al (2014)	<p>Akuntabilitas Sosial pada Pemerintahan Lokal (Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan</p>	<p>Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan studi teori grounded. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang bersifat analisis</p>

		Tawangmangu)	deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.
--	--	--------------	--

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber 2021